



Kemenag
Berdampak



× × × ×



× × ×

LAPORAN KINERJA

× × × ×

KANWIL KEMENAG
PROV. JAWA TIMUR
TAHUN 2025

× × × ×



**LAPORAN KINERJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2025**

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Akhmad Sruji Bahtiar

Penanggung Jawab:

Syaikhul Hadi, Mohammad Asadul Anam, Sugiyo, Imam Turmidi,
Moh. Amak Burhanudin, Munir, Moh. Arwani, Luki Krispriyanto,
Aries Papudi, Budiono, Ketut Panji Budiawan.

Penyusun:

Fitra Luqman Hidayat, Awinullah, Bagus Budiman, Nisrina El Khumairoh,
Anung Hendhi Pramono, Achmad Ubaidillah, Airlangga Gama Shakti,
Wasudewa Bhattacharya, Patricia Fury Ratrining Handayani, Etik Baryati

Editor:

Rahmawaty, Nisrina El Khumairoh

Desain Tampilan/Tata Letak:

Alfi Nurul Afida

Produksi:

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur
Tahun 2026



jatim.kemenag.go.id



[kemenagjawatimur](#)



[Kemenag Jatim](#)





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dapat disusun tepat waktu. LKj ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Laporan kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan sarana transparansi. LKj juga berperan sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja, sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Harapannya, laporan ini menjadi sumber informasi kinerja yang terukur dan mendukung perbaikan berkesinambungan dalam organisasi.

LKj ini adalah laporan pertama dari periode Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 2025-2029. Terdapat ikhtisar yang memberikan gambaran lengkap tentang organisasi, perencanaan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas ini mencakup pencapaian kinerja yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PERKIN) di awal tahun, serta realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dr. AKHMAD SRUJI BAHTIAR, M.Pd.I
Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur





Penyusunan LKj melibatkan seluruh unsur di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan dilakukan melalui proses koreksi yang berjenjang. Namun, kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan demi terlaksananya tugas dan fungsi Kementerian Agama yang lebih baik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam peningkatan kinerja organisasi dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025.

Sidoarjo, 13 Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur



Akhmad Sruji Bahtiar



 jatim.kemenag.go.id

 [kemenagjawatimur](https://www.instagram.com/kemenagjawatimur)

 [Kemenag Jatim](https://www.facebook.com/KemenagJatim)



IKHTISAR EKSEKUTIF



Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) yang telah ditandatangani. Laporan ini juga mencerminkan penggunaan anggaran dan berfungsi sebagai wujud keterbukaan informasi publik demi tercapainya good governance.

Sebagai laporan tahun pertama dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur 2025-2029. LKj ini mencakup pelaksanaan program-program strategis yang telah ditetapkan. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 20 sasaran program/kegiatan, dengan 93 indikator kinerja, beserta target-target yang ingin dicapai. Berikut adalah ringkasan sasaran kegiatan dan capaian kinerja:



next





Capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja menunjukkan hasil di atas target dengan kategori sangat baik. Rerata capaian kinerja tercatat sebesar

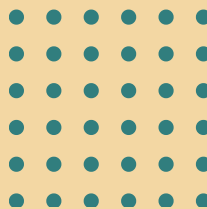
104.88%,

sementara realisasi anggaran mencapai

99.51%
atau
Rp 2.518.342.178.56,-

dari total anggaran Rp 2.530.618.688.000,-.

Kedepan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah strategis guna terus meningkatkan capaian kinerja di seluruh IKU yang telah diperjanjikan. Mengingat Tahun 2025 adalah tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029, kelemahan-kelemahan yang ditemukan akan menjadi bahan evaluasi untuk terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mendorong peningkatan kinerja.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	xv
Daftar Tabel	xvi

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang	1
Visi, Misi, dan Tujuan	5
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
Sistematika Penyajian	7

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis	9
Sasaran Kegiatan	10
Perjanjian Kinerja	17

BAB II

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja	25
Analisis Capaian Kinerja	36
Realisasi Anggaran	74

PENUTUP

Penutup	76
---------	----

BAB IV

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

× × × ×

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	17
Tabel 3.1	Kategori Capaian Kinerja	25
Tabel 3.2	Target dan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	26
Tabel 3.3	Anggaran dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025	74



Kemenag
Berdampak



× × × ×

× × × ×



BAB I

PENDAHULUAN



× × × ×

× × × ×

 jatim.kemenag.go.id

 [kemenagjawatimur](https://www.instagram.com/kemenagjawatimur)

 [Kemenag Jatim](https://www.facebook.com/KemenagJatim)



× × × ×

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di bagian timur Pulau Jawa dengan ibu kota Surabaya. Wilayah Provinsi Jawa Timur bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Selat Bali, bagian selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 9 Kota. Luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur adalah 48.036,84 km². Kabupaten/Kota yang memiliki wilayah paling luas adalah Kabupaten Banyuwangi yaitu sekitar 3.594 km². Sedangkan yang memiliki luas paling kecil adalah Kota Mojokerto dengan luas wilayah 20,48 km².

Berdasarkan sensus penduduk Tahun 2025, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak **42.089.271 (empat puluh dua juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu)** jiwa. Di Jawa Timur juga terdapat berbagai macam tempat ibadah, antara lain **55.646** masjid, **117.489** musala, **4.259** gereja Protestan, **325** gereja Katolik, **526** Pura, **170** Vihara dan **23** Klenteng.

Secara sosial-budaya, masyarakat Jawa Timur dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama; Pertama, masyarakat Mataraman 45% (persen) yang mencakup wilayah Jawa Timur bagian barat seperti Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Kediri, Nganjuk, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, hingga bagian selatan Kab. Malang, Lumajang dan Jember. Kedua, masyarakat Arek (20%) yang mencakup Lamongan, Gresik, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo hingga Malang bagian utara. Ketiga, masyarakat Madura (30%) yang mencakup empat Kabupaten di Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, hingga bagian utara Jember dan Lumajang. Keempat, budaya Osing (5%) berada di Kabupaten Banyuwangi.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur merupakan instansi vertikal yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, susunan organisasi Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Pendidikan Madrasah;
3. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4. Bidang Pendidikan Agama Islam;
5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

6. Bidang Urusan Agama Islam;
7. Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf;
8. Pembimbing Masyarakat Kristen;
9. Pembimbing Masyarakat Katolik;
10. Pembimbing Masyarakat Hindu;
11. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah ASN sebanyak **37.010 pegawai** yang tersebar di berbagai satuan kerja baik pada Kantor Wilayah, **38** Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maupun KUA dan Madrasah. Di Jawa Timur terdapat:

665 Kantor Urusan Agama (KUA); **148** Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN); **200** Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN); dan **91** Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Adapun untuk lembaga swasta terdapat **7.563** Raudhatul Athfal (RA); **7.532** Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS); **3.829** Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS); dan **2.112** Madrasah Aliyah Swasta (MAS). Untuk penyuluh agama di Jawa Timur berjumlah total **3.091** orang penyuluh, yang terdiri dari **2.899** penyuluh agama Islam; **50** penyuluh agama Kristen; **23** penyuluh agama Katolik; **28** penyuluh agama Hindu; **76** penyuluh Buddha; dan **15** penyuluh agama Khonghucu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menganut asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan negara, diantaranya dalam UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam Pasal 3 UU tersebut menyebutkan asas umum penyelenggaraan negara terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas sendiri merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas kinerja yang merupakan garda depan menuju *good governance* berkaitan dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk sebaik-baiknya pelayanan publik. Perubahan *mindset* dan

culture-set penyelenggaraan birokrasi yang semula berorientasi kerja (*output*) menjadi berorientasi kinerja (*outcome*) merupakan titik berat dalam konsep akuntabilitas kinerja. Dalam rangka menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dikembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tersebut kemudian diterapkan melalui pembuatan laporan kinerja yang menentukan target kinerja disertai dengan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan instansi pemerintah.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 94 Tahun 2021,

AKUNTABILITAS KINERJA

adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

Sebagai bagian dari Kementerian yang memiliki mandat dalam urusan keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menjabarkan dan menyelaraskan visi nasional Kementerian Agama ke dalam arah pembangunan jangka menengah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun Visi Kementerian Agama Tahun 2025-2029 adalah:

*"Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat,
dan Cerdas Bersama Indonesia Maju
Menuju Indonesia Emas 2045."*

Visi tersebut mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, pelayanan keagamaan yang berdampak dan pendidikan keagamaan yang unggul sebagai pilar kemajuan bangsa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memaknai visi tersebut sebagai landasan dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pelayanan keagamaan yang inklusif dan adil, serta pengembangan pendidikan yang religius, berkualitas, dan berdaya saing global.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Agama menetapkan **3 (tiga)** misi utama yang akan menjadi arah pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola selama periode 2025-2029:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren dan pendidikan keagamaan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kementerian Agama menetapkan **TUJUAN STRATEGIS** sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul dan berdaya saing;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

TUGAS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bertugas melakukan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur;
2. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan kehidupan beragama;
3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
6. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
7. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
8. Pelaksanan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur.

STRUKTUR ORGANISASI

Berikut adalah gambaran struktur organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur:



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama pada Tahun 2025, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) terhadap rencana kinerja (*performance plans*). Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja (LKj) adalah sebagai berikut:

- **BAB I**  Pendahuluan, menyajikan latar belakang penyusunan LKj
- **BAB II**  Rencana Strategis dan Sasaran Kinerja, menyajikan rencana strategis dan sasaran kinerja Tahun 2025
- **BAB III**  Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Keuangan, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan realisasi keuangan pada Tahun 2025
- **BAB IV**  Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di tahun 2025
- **LAMPIRAN**



Kemenag
Berdampak



× × × ×

× × × ×

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

× × × ×

× × × ×

 jatim.kemenag.go.id

 [kemenagjawatimur](https://www.instagram.com/kemenagjawatimur)

 [Kemenag Jatim](https://www.facebook.com/KemenagJatim)

× × × ×

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan analisis ilmiah dan data empiris untuk menghasilkan perencanaan yang rasional, terukur dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran dan program kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta kerangka pembangunan nasional dan sektoral juga selaras dengan visi, misi dan program kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

Secara yuridis penyusunan Renstra mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, keterkaitan antara Renstra dan RKAKL dengan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja yaitu setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran serta mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan rencana strategis satuan kerja serta Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja saling berkaitan dan menjadi dasar kinerja pegawai yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk mewujudkannya, pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi dengan memperhatikan pada Gambaran Keseluruhan Organisasi pada dokumen Rencana Strategis Instansi/unit kerja dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

Dengan landasan pendekatan teknokratik, Renstra Tahun 2025-2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga menjadi instrumen

manajemen yang efektif untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Jawa Timur secara lebih terukur, akuntabel dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Ruang lingkup kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang luas, mencakup hampir seluruh aspek kehidupan keagamaan masyarakat, mulai dari pembinaan umat, penguatan lembaga pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengelolaan zakat dan wakaf, pelayanan keluarga melalui KUA, hingga tata kelola organisasi. Sasaran Kegiatan mendukung terwujudnya realisasi Sasaran Program di atasnya, selanjutnya mendukung terwujudnya realisasi sasaran strategis, tujuan sampai pada misi dan puncaknya ikut mewujudkan visi yang ditetapkan.

Memasuki periode Tahun 2025-2029, arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengacu pada **8 (delapan)** program prioritas yang dirumuskan dalam ASTA PROTAS. Fokus diarahkan pada **“penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui desa sadar kerukunan, pembinaan penyuluh, dan forum lintas iman”**. Program ekoteologi menekankan pelestarian lingkungan berbasis nilai agama dengan rumah ibadah ramah lingkungan dan gerakan hijau berbasis komunitas. Layanan keagamaan diarahkan agar lebih berdampak dengan standarisasi bimbingan perkawinan, digitalisasi data rumah ibadah, serta KUA inklusif. Pendidikan unggul menjadi sektor kunci, dengan pengembangan kurikulum kontekstual, digitalisasi madrasah, peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa serta akreditasi. Pesantren diberdayakan melalui program kemandirian ekonomi, beasiswa santri dan peran pesantren sebagai pusat layanan gizi. Ekonomi umat diperkuat dengan pengelolaan zakat dan wakaf produktif serta rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan. Seluruh program tersebut ditopang digitalisasi tata kelola melalui sistem satu data, *superapps* layanan dan pembelajaran berbasis LMS.

Dengan panduan ASTA PROTAS 2025-2029, arah kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dapat lebih adaptif dan inklusif. Tantangan ke depan menuntut inovasi berkelanjutan, transparansi layanan dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah. Program yang dirumuskan dapat merespons kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik keagamaan di Jawa Timur diharapkan semakin kuat, merata dan berdaya guna.

B. SASARAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-

2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Kementerian Agama Berdampak dan program utama, Kementerian Agama telah menetapkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur merupakan turunan langsung dari sasaran kegiatan Kementerian Agama, yang secara hierarki dijabarkan lebih lanjut pada level wilayah untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterkaitan strategis dengan arah kebijakan nasional.

Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pada dasarnya ada tiga bidang kategori penggolongan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya, yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola. Adapun Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN BIDANG AGAMA

Ada 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan Bidang Agama, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00
 - b. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
 - c. Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA
 - d. Persentase peningkatan peserta event seni budaya
 - e. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan

2. Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak, dengan Indikator Kinerja:

- a. Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
- b. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
- c. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi
- d. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah
- e. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan
- f. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan
- g. Persentase masjid/musala bersertifikat arah kiblat
- h. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan
- i. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah
- j. Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan
- k. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
- l. Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
- m. Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
- n. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan
- o. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional
- p. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
- q. Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti
- r. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif
- s. Persentase Lembaga dan sosial keagamaan/ Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional
- t. Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional
- u. Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina
- v. Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf
- w. Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan

3. **Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota
4. **Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan
 - b. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu
5. **Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar
6. **Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75
 - b. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji
7. **Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A), 1) Lembaga penyelenggara haji khusus; 2) Lembaga penyelenggara umrah

SASARAN KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH

Ada 4 (empat) Sasaran Kegiatan Bidang Pendidikan Dasar Menengah, sebagai berikut:

1. **Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase siswa/santri satuan pendidikan agama, satuan umum dengan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan dengan pendidikan pesantren yang lulus predikat sangat baik
2. **Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif
 - b. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana

- c. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren
 - d. Persentase Anak Kelas 1 MI/ SD/ Adi Widyalyaya/ Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/ RA/ BA/ Taman Seminari/ Pratama Widyalyaya/ Nava Dhammasekha)
 - e. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah
 - f. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren
3. Meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan, dengan Indikator Kinerja:
- a. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: 1) literasi membaca; 2) numerasi
 - b. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
 - c. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
 - d. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler
 - e. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
 - f. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
 - g. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B
 - h. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
 - i. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual
 - j. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
 - k. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
 - l. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

- m. Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan
- 4. **Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik
 - b. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP
 - c. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
 - d. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik
 - e. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
 - f. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
 - g. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
 - h. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil
 - i. Persentase guru yang meningkat jenjang karir
 - j. Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
 - k. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 - l. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan

SASARAN KEGIATAN BIDANG TATA KELOLA

Ada 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut:

- 1. **Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Kinerja Anggaran
- 2. **Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
 - b. Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75
- 3. **Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 - b. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

- c. Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
- d. Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). *(SE 6 Setjen Tahun 2025, dari 492 yang ditunjuk 137, untuk kanwil 3 satker: setjen, bima dan pendis)*
- e. Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
- 4. **Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
 - c. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi
- 5. **Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase kasus hukum yang terselesaikan
 - b. Persentase rekomendasi izin orang asing
- 6. **Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses
 - b. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
- 7. **Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
 - b. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
- 8. **Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Indeks Pembangunan Statistik
 - b. Persentase data statistik yang dipublikasi
- 9. **Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan**, dengan Indikator Kinerja:
 - a. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
 - b. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
 - c. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
 - d. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media

- e. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
- f. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
- g. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

C. PERJANJIAN KINERJA

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur Tahun 2025**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Target	Satuan
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	83	Nilai
		3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	44,45	Persen
		4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	1	Persen
		5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	1	Persen
		6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	35,5	Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	91	Persen
		2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	01:05	Rasio
		3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	44,5	Persen
		4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	4,1	Persen
		5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	17,5	Persen
		6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	18,2	Persen
		7	Persentase masjid/musala bersertifikat arah kiblat	45,5	Persen
		8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	32,5	Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Target	Satuan
		9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	16,5	Persen
		10	Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan	91	Persen
		12	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	25,35	Persen
		13	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	- 5,47	Persen
		14	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	4,91	Persen
		15	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	0,1	Persen
		16	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	9,2	Persen
		17	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	11	Persen
		18	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	11	Persen
		19	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	6	Persen
		20	Persentase Lembaga dan sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional	25	Persen
		21	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional	2	Persen
		22	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	15	Persen
		23	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	6	Persen
		24	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	10	Persen
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	5	Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Target	Satuan
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80	Persen
		2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	86	Nilai
5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	87,5	Persen
6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	80	Persen
		2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	85,5	Persen
7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A)		
		a	Lembaga penyelenggara haji khusus	82,05	Persen
		b	Lembaga penyelenggara umrah	96,01	Persen
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan agama, satuan umum dengan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan dengan pendidikan pesantren yang lulus predikat sangat baik	35	Persen
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	9	Persen
		2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	5	Persen
		3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	7,2	Persen
		4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)	93	Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Target	Satuan
		5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	55	Persen
		6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	2319	Jumlah
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:		
		a	literasi membaca	67	
		b	Numerasi	61,5	
		2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	94	Persen
		3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	95	Persen
		4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	3800	Jumlah
		5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	93	Persen
		6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	92	Persen
		7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	65,40	Persen
		8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	3,7	Persen
		9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	0,25	Persen
		10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,47	Persen
		11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	95,50	Persen
		12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	74	Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Target	Satuan
		13	Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan	30	Persen
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	54	Persen
		2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	01:11	Rasio
		3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	89,5	Persen
		4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	40	Persen
		5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	55	Persen
		6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	80,00	Persen
		7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	75	Persen
		8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	80	Persen
		9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	0,45	Persen
		10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	0,7	Persen
		11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	59	Persen
		12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	50	Persen
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Nilai Kinerja Anggaran	95	Nilai
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75	Persen
		2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	85	Nilai
14		1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	77,14	Nilai

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Target	Satuan
	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	68,19	Persen
		3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	93,65	Persen
		4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	37,5	Persen
		5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	70,33	Persen
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Indeks Profesionalisme ASN	75,1	Nilai
		2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	65,97	Persen
		3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif	5	Jumlah
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	76	Persen
		2	Persentase rekomendasi izin orang asing	91	Persen
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	46,2	Persen
		2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	64	Persen
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	80	Nilai
		2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	24,6	Persen
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Indeks Pembangunan Statistik	2,72	Nilai
		2	Persentase data statistik yang dipublikasi	2,12	Persen
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	73,60	Persen

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
				Target	Satuan
		2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	0,92	Persen
		3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	11	Persen
		4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	22,58	Persen
		5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	68,6	Persen
		6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	69,34	Persen
		7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92,84	Nilai



Kemenag
Berdampak



× × × ×

× × × ×

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



× × × ×

× × × ×

 jatim.kemenag.go.id

 [kemenagjawatimur](https://www.instagram.com/kemenagjawatimur)

 [Kemenag Jatim](https://www.facebook.com/KemenagJatim)

× × × ×

A. CAPAIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan bertujuan menjamin keberhasilan pelaksanaan serta memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja satuan kerja. Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin).

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target yang tercantum dalam dokumen Perkin.

Mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, bahwa batasan capaian kinerja ditentukan antara 0% hingga 120%. Capaian di atas 120% hanya dihitung 120%, sementara capaian dibawah 0% dihitung 0%. Klasifikasi capaian kinerja terdiri dari empat kategori, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 - 200	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79,99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Secara rinci target dan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target dan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	83	108.73%	Sangat Baik
		3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	44,45	108.99%	Sangat Baik
		4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PES PERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	1	109.93%	Sangat Baik
		5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	1	109.78%	Sangat Baik
		6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	35,5	109.85%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 1			109.46%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	91	107.50%	Sangat Baik
		2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	01:05	109.95%	Sangat Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
		3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	44,5	100%	Baik
		4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	4,1	100%	Baik
		5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	17,5	105.22%	Sangat Baik
		6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	18,2	109.92%	Sangat Baik
		7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	45,5	100%	Baik
		8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	32,5	110%	Sangat Baik
		9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	16,5	109.98%	Sangat Baik
		10	Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan	91	100%	Baik
		12	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	25,35	109.84%	Sangat Baik
		13	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	- 5,47	106.79%	Sangat Baik
		14	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	4,91	100%	Baik
		15	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	0,1	109.84%	Sangat Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
		16	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	9,2	110%	Sangat Baik
		17	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	11	109.97%	Sangat Baik
		18	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	11	109.15%	Sangat Baik
		19	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	6	108.88%	Sangat Baik
		20	Persentase Lembaga dan sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	25	110%	Sangat Baik
		21	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	2	109.28%	Sangat Baik
		22	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	15	109.73%	Sangat Baik
		23	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	6	109.73%	Sangat Baik
		24	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	10	110%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 2			107.21%	Sangat Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	5	100%	Baik
		Rerata Capaian Sasaran 3			100%	Baik
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	80	109.96%	Sangat Baik
		2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	86	109.01%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 4			109.49%	Sangat Baik
5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	87,5	100.54%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 5			100.54%	Sangat Baik
6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	80	109.79%	Sangat Baik
		2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	85,5	106.39%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 6			108.09%	Sangat Baik
7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A)			
		a	Lembaga penyelenggara haji khusus	82,05	108.12%	Sangat Baik
		b	Lembaga penyelenggara umrah	96,01	109.88%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 7			109%	Sangat Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan agama, satuan umum dengan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan dengan pendidikan pesantren yang lulus predikat sangat baik	35	109.07%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 8			109.07%	Sangat Baik
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	9	100%	Baik
		2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	5	109.85%	Sangat Baik
		3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	7,2	100%	Baik
		4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	93	110%	Sangat Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
		5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	55	100%	Baik
		6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	2319	100%	Baik
		Rerata Capaian Sasaran 9			103.31%	Sangat Baik
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:			
		a	literasi membaca	67	100%	Baik
		b	numerasi	61,5	100%	Baik
		2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	94	100%	Baik
		3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	95	110%	Sangat Baik
		4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	3800	100.05%	Sangat Baik
		5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	93	100%	Baik
		6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	92	100%	Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
		7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	65,40	100%	Baik
		8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	3,7	100%	Baik
		9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	0,25	100%	Baik
		10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	0,47	100%	Baik
		11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	95,50	100%	Baik
		12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	74	100%	Baik
		13	Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan	30	100%	Baik
		Rerata Capaian Sasaran 10			100.72%	Sangat Baik
		1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	54	110%	Sangat Baik
		2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	01:11	100%	Baik
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	89,5	109.99%	Sangat Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
		4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	40	106.09%	Sangat Baik
		5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	55	100%	Baik
		6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	80,00	100%	Baik
		7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	75	110%	Sangat Baik
		8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	80	100%	Baik
		9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	0,45	110%	Sangat Baik
		10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	0,7	100%	Baik
		11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	59	100%	Baik
		12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	50	109.81%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 11			104.66%	Sangat Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Nilai Kinerja Anggaran	95	109.45%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 12			109.45%	Sangat Baik
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	75	100%	Baik
		2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	85	101.69%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 13			100.85%	Sangat Baik
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	77,14	108.91%	Sangat Baik
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	68,19	100%	Baik
		3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	93,65	109.58%	Sangat Baik
		4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	37,5	100%	Baik
		5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	70,33	100%	Baik
		Rerata Capaian Sasaran 14			103.70%	Sangat Baik
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	1	Indeks Profesionalisme ASN	75,1	100%	Baik
		2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	65,97	109.98%	Sangat Baik
		3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspirasi	5	110%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 15			106.66%	Sangat Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	76	100%	Baik
		2	Persentase rekomendasi izin orang asing	91	100%	Baik
		Rerata Capaian Sasaran 16			100%	Baik
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	46,2	109.77%	Sangat Baik
		2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	64	107.08%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 17			108.43%	Sangat Baik
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	80	104.17%	Sangat Baik
		2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	24,6	107.08%	Sangat Baik
		Rerata Capaian Sasaran 18			105.63%	Sangat Baik
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Indeks Pembangunan Statistik	2,72	100%	Baik
		2	Persentase data statistik yang dipublikasi	2,12	100%	Baik
		Rerata Capaian Sasaran 19			100%	Baik
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	73,6	100%	Baik
		2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	0,92	109.18%	Sangat Baik
		3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	11	100%	Baik

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Capaian Kinerja (%)	Kategori
		4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	22,58	106.44%	Sangat Baik
		5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	68,6	108.24%	Sangat Baik
		6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	69,34	100%	Baik
		7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	92,84	100%	Baik
		Rerata Capaian Sasaran 20			103.41%	Sangat Baik
		Rerata Capaian IKU			104.88%	Sangat Baik

Seluruh indikator kinerja menunjukkan capaian diatas target, dengan rerata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 mencapai 104,88% atau dalam kategori **sangat baik**. Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, yang mencapai rerata 102,11%, capaian Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 2,77%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keterkaitan antara pencapaian kinerja kegiatan dengan program dalam mewujudkan sasaran, visi, misi dan tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berikut kami sampaikan analisis capaian kinerja pada Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

SK 1 : Meningkatnya Jaminan Beragama, Toleransi, dan Cinta Kemanusiaan Umat Beragama

Di tengah keragaman yang ada, agama bukan sekedar identitas, melainkan fondasi moral. Keharmonisan adalah hasil dari upaya untuk saling menjaga, menghargai dan melindungi. Sasaran Kegiatan ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara tidak hanya bebas berkeyakinan, tetapi juga merasa aman dan dicintai dalam keberagamannya.

Hak setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya dijamin sepenuhnya oleh negara dan didukung oleh masyarakat. Jaminan disini bukan sekedar perlindungan hukum, melainkan upaya menciptakan ruang publik yang inklusif, dimana tidak ada lagi rasa was-was dalam mengekspresikan pengabdian kepada Tuhan. Toleransi menjadi sebuah kondisi di mana antar umat beragama saling mengenal, berdialog dan bekerjasama. Dengan memperkuat moderasi beragama dan membangun jembatan pemahaman yang kokoh berfondasi rasa hormat. Puncak dari keberagaman yang sehat adalah cinta kemanusiaan. Agama menjadi solusi atas tantangan zaman, mulai dari kemiskinan hingga ketidakadilan sosial. Ketika umat beragama bersatu dalam misi kemanusiaan, perbedaan teologis menjadi warna yang memperindah aksi nyata untuk menolong sesama tanpa memandang latar belakang.

Melalui peningkatan jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama ini, dampak yang diharapkan akan melahirkan masyarakat yang memiliki ketahanan sosial yang tinggi, masyarakat yang tidak mudah terprovokasi, yang mampu menyelesaikan konflik dengan dialog dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai energi penggerak untuk kemajuan bangsa.

Dalam Sasaran Kegiatan Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama terdapat 5 indikator yang harus dipenuhi, yakni: Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00; Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS; Persentase peningkatan audiens MTQ/ PESPARAWI/ PESPERANI/ UTSAWA DHARMA GITA/ SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA; Persentase peningkatan peserta event seni

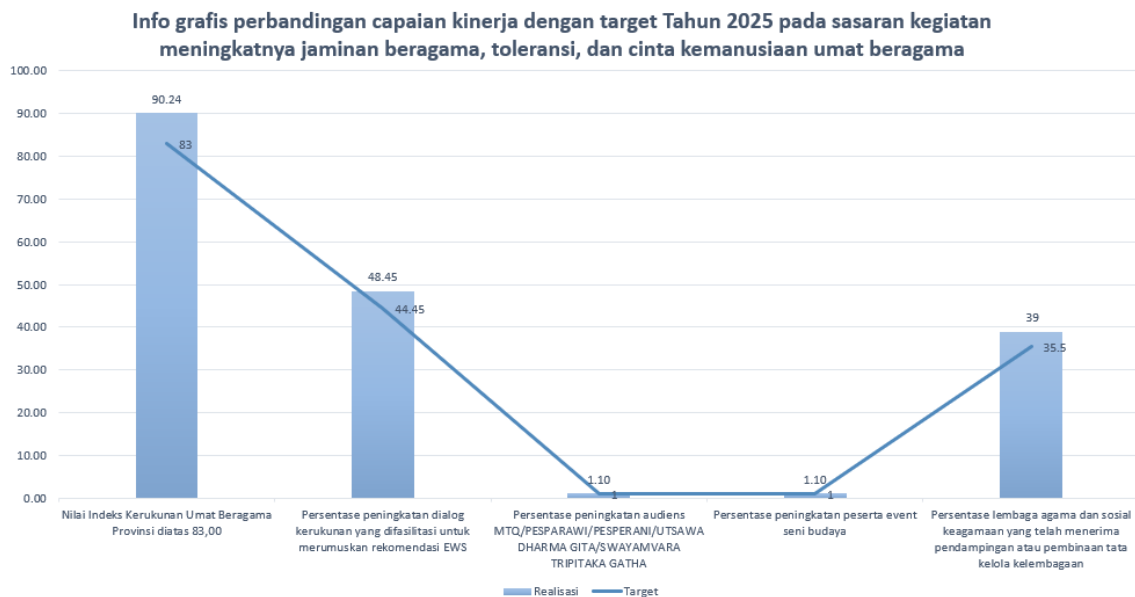
budaya; dan Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.



Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi FKUB dan Lintas Sektoral pada Kamis–Jumat (30–31/10/2025). Kegiatan ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi, membangun sinergi, serta merumuskan langkah bersama dalam menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama di Jawa Timur.

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00;
2. Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS;
3. Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA;
4. Persentase peningkatan peserta event seni budaya; dan
5. Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan.



Untuk indikator kinerja nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00, persentase capaian kinerja sebesar 108,73% dengan target nilai 83. Untuk indikator kinerja persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS, persentase capaian kinerja sebesar 108,99% dengan target 44,45%. Untuk indikator kinerja persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA, persentase capaian kinerja sebesar 109,93% dengan target 1%. Untuk indikator kinerja persentase peningkatan peserta event seni budaya, persentase capaian kinerja sebesar 109,78% dengan target 1%. Untuk indikator kinerja persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan, persentase capaian kinerja sebesar 109,85% dengan target 35,50%.

SK 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Keagamaan Yang Profesional, Inklusif, dan Berdampak

Sasaran kegiatan ini merupakan komitmen strategis dalam mewujudkan tata kelola layanan keagamaan yang semakin baik, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan keagamaan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan layanan administratif semata, namun juga sebagai upaya menyeluruh dalam menghadirkan pelayanan yang transparan, akuntabel, cepat dan tepat sasaran.

Profesionalitas menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan layanan keagamaan. Hal ini diwujudkan melalui penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan SOP yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap bentuk layanan, baik berkaitan

dengan bimbingan, pembinaan, administrasi, maupun fasilitasi kegiatan keagamaan dapat dilakukan secara efektif dan berintegritas.

Selain profesional, layanan keagamaan juga harus bersifat inklusif. Artinya, seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, golongan, gender, usia maupun kondisi sosial-ekonomi memiliki akses yang setara terhadap layanan yang diberikan. Pendekatan yang ramah, humanis dan menghargai keberagaman menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas layanan keagamaan diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak tersebut tercermin dalam meningkatnya kepuasan masyarakat, terbangunnya kehidupan beragama yang moderat dan toleran, serta semakin kuatnya kontribusi nilai-nilai keagamaan dalam pembangunan karakter dan kesejahteraan sosial. Dengan layanan yang profesional, inklusif dan berdampak, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dapat menjadi penggerak terciptanya masyarakat yang rukun, berdaya dan berakhlak mulia.



Gerakan Wakaf Uang Provinsi Jawa Timur resmi dilaunching oleh Kepala Kanwil Kemenag Jatim, Ketua BWI Jawa Timur, serta Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (12/12/2025)

Pada sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif dan berdampak terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja yang harus tercapai, yakni:

1. Persentase penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja berkategori baik (laporan harian, konten digital, kediklatan), target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 91% dengan capaian kinerja sebesar 107,50%.

2. Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama, target indikator kinerja pada Tahun 2025 adalah 01:05 dengan capaian kinerja sebesar 109,95%.
3. Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 44,5% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 4,1% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 17,5% dengan capaian kinerja sebesar 105,22%.
6. Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 18,2% dengan capaian kinerja sebesar 109,92%.
7. Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 45,5% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
8. Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 32,5% dengan capaian kinerja sebesar 110%.
9. Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 16,5% dengan capaian kinerja sebesar 109,98%.
10. Persentase calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 91% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
11. Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 25,35% dengan capaian kinerja sebesar 109,84%.
12. Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar - 5,47% dengan capaian kinerja sebesar 106,79%.
13. Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 4,91% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
14. Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 0,1% dengan capaian kinerja sebesar 109,84%.

15. Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 9,2% dengan capaian kinerja sebesar 110%.
16. Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 11% dengan capaian kinerja sebesar 109,97%.
17. Persentase advokasi pengamanan harta benda wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 11% dengan capaian kinerja sebesar 109,15%.
18. Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 6% dengan capaian kinerja sebesar 108,88%.
19. Persentase lembaga dan sosial keagamaan/zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 25% dengan capaian kinerja sebesar 110%.
20. Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 2% dengan capaian kinerja sebesar 109,28%.
21. Persentase lembaga zakat dan wakaf yang dibina, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 15% dengan capaian kinerja sebesar 109,73%.
22. Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 6% dengan capaian kinerja sebesar 109,73%.
23. Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 10% dengan capaian kinerja sebesar 110%.

**Info grafis perbandingan capaian kinerja dengan target Tahun 2025 pada sasaran kegiatan
Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak**





SK 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jemaah Haji

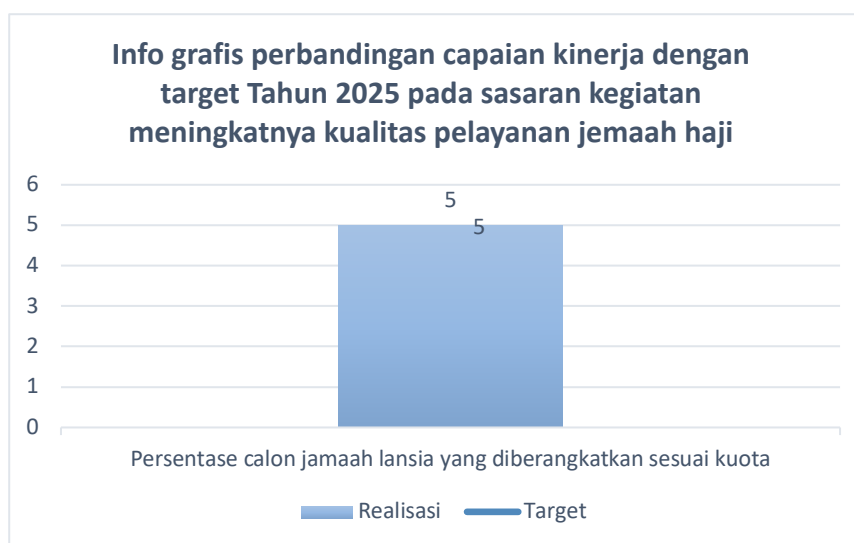
Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji merupakan wujud komitmen dalam memberikan layanan terbaik bagi seluruh calon dan jemaah haji, mulai dari tahap pendaftaran, persiapan keberangkatan, pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, hingga kepulangan ke tanah air. Peningkatan kualitas pelayanan diarahkan untuk memastikan setiap jemaah memperoleh pembinaan, pendampingan, serta fasilitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman dan khushyuk.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penguatan sistem manajemen penyelenggaraan haji yang profesional, transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup menyempurnaan prosedur layanan administrasi, peningkatan kompetensi petugas haji, optimalisasi manasik haji, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi dan pemantauan layanan. Peningkatan kualitas pelayanan juga menekankan aspek perlindungan dan pembinaan jemaah. Penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi serta layanan kesehatan di Arab Saudi dilakukan secara terintegrasi, berstandar serta bekerjasama dengan otoritas terkait di Arab Saudi. Pendekatan ramah lansia dan responsif terhadap kebutuhan khusus juga menjadi perhatian, mengingat karakteristik jemaah yang beragam.



Petugas haji memberikan layanan terbaik terutama bagi para jemaah haji lanjut usia Tahun 2025 pada Embarkasi Surabaya

Dengan meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, diharapkan tercapai tingkat kepuasan jemaah yang lebih tinggi, terselenggaranya ibadah haji yang tertib dan lancar, serta terwujudnya jemaah haji yang mandiri, sehat, dan memperoleh haji yang mabrur. Sasaran kegiatan ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan prima. Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji terdapat satu indikator kinerja, yaitu persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota. Target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 5% dengan capaian kinerja sebesar 100%.



SK 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji

Sasaran kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan proses awal penyelenggaraan ibadah haji berjalan secara tertib, transparan dan akuntabel. Pendaftaran haji adalah tahapan fundamental yang menentukan kelancaran proses selanjutnya, sehingga kualitas layanan pada tahap ini harus mampu memberikan kepastian, kemudahan dan rasa aman bagi masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran dilaksanakan melalui penyederhanaan prosedur, kejelasan persyaratan, serta optimalisasi sistem layanan berbasis teknologi informasi. Penguatan sistem digital memungkinkan proses pendaftaran menjadi lebih cepat, akurat dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalisir kesalahan administrasi serta meningkatkan transparansi antrean keberangkatan.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga ditunjang oleh peningkatan kompetensi dan integritas petugas layanan. Petugas diharapkan mampu memberikan informasi yang jelas, ramah dan responsif terhadap kebutuhan calon jemaah, termasuk memberikan pendampingan bagi pendaftar lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan tertentu. Standar pelayanan yang terukur serta mekanisme pengaduan masyarakat turut diperkuat guna menjamin akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, diharapkan terwujud proses yang lebih efisien, transparan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sasaran kegiatan ini sekaligus mendukung tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang profesional serta membangun kepercayaan publik terhadap layanan di bidang keagamaan.

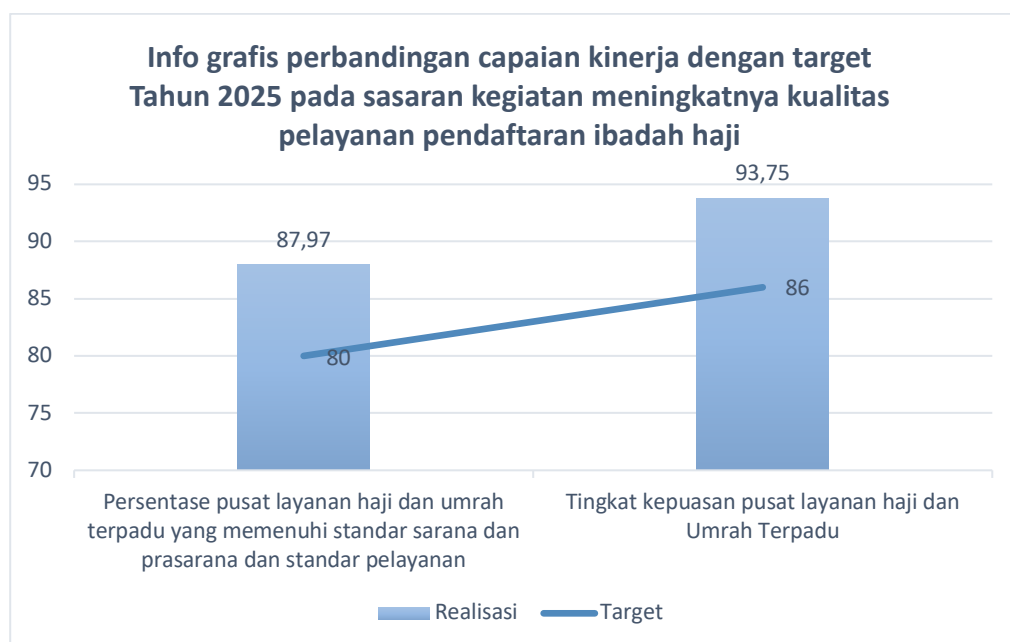


Layanan pelimpahan porsi haji pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan; dan
2. Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umrah terpadu.

Pada indikator kinerja persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan, persentase capaian kinerja sebesar 109,96% dengan target sebesar 80%. Untuk indikator kinerja tingkat kepuasan pusat layanan haji dan umrah terpadu, persentase capaian kinerja sebesar 109,01% dengan target nilai 86.



SK 5 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jemaah Haji

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji merupakan komitmen untuk menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang semakin profesional, humanis dan berorientasi pada kebutuhan jemaah. Pelayanan jemaah haji tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga meliputi pembinaan, pendampingan, perlindungan serta pemenuhan kebutuhan dasar jemaah sejak sebelum keberangkatan, selama di Tanah Suci, hingga kembali ke tanah air. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penguatan tata kelola penyelenggaraan haji yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi petugas haji, optimalisasi bimbingan manasik, penyediaan informasi yang akurat dan mudah diakses,

serta pemanfaatan teknologi yang mendukung efektivitas layanan. SOP yang jelas dan sistem monitoring yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam memastikan layanan berjalan sesuai ketentuan.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan juga menitikberatkan pada aspek kenyamanan dan keselamatan jemaah selama berada di Arab Saudi. Penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, serta layanan kesehatan dilaksanakan secara terintegrasi dengan memperhatikan kebutuhan jemaah, termasuk jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pendekatan yang ramah, sigap dan solutif dari petugas menjadi kunci dalam memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji, diharapkan tercapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi, terselenggaranya ibadah haji yang tertib dan lancar, serta terwujudnya jemaah yang mandiri, sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Sasaran ini sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang semakin berkualitas dan berorientasi pada pelayanan prima.



Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan kenyamanan bagi para jemaah haji Tahun 2025 baik akomodasi, konsumsi maupun transportasi. Pendampingan petugas haji yang sigap, fasilitas kursi roda hingga pemeriksaan kesehatan.

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji terdapat satu indikator kinerja, yaitu persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar. Target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 87,5% dengan capaian kinerja sebesar 100,54%.

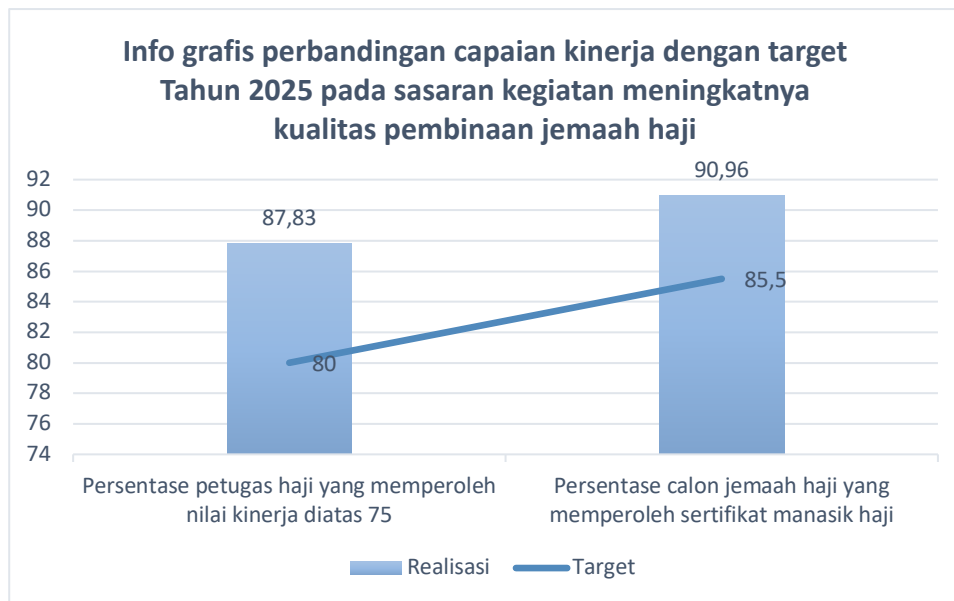
Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji merupakan upaya strategis dalam mempersiapkan jemaah agar mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji secara mandiri, tertib dan sesuai dengan tuntunan syariat. Pembinaan yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam menciptakan jemaah yang tidak hanya memahami tata cara manasik, namun juga memiliki kesiapan mental, spiritual dan fisik dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Peningkatan kualitas pembinaan dilaksanakan melalui penyempurnaan kurikulum manasik haji yang komprehensif, sistematis dan aplikatif. Materi pembinaan tidak hanya fokus pada teori, namun juga praktik lapangan, simulasi rangkaian ibadah serta penguatan pemahaman tentang kebijakan dan prosedur penyelenggaraan haji. Dalam pelaksanaan pembinaan melibatkan para pembimbing yang kompeten dan tersertifikasi.

Selain itu, peningkatan kualitas pembinaan juga menekankan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap karakteristik jemaah yang beragam, termasuk jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Pemanfaatan media pembelajaran digital, modul interaktif serta layanan konsultasi menjadi bagian dari inovasi pembinaan agar materi lebih mudah dipahami dan diakses. Dengan meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, diharapkan jemaah memiliki pemahaman yang utuh tentang manasik, mampu menjaga kesehatan dan keselamatan selama beribadah di Arab Saudi serta dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk dan tertib. Sasaran ini pada akhirnya mendukung terwujudnya jemaah haji yang mandiri, berakhlak mulia dan memperoleh haji yang mabrur.

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75; dan
2. Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji.

Pada indikator kinerja persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75, persentase capaian kinerja sebesar 109,79% dengan target sebesar 80%. Untuk indikator kinerja persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji, persentase capaian kinerja sebesar 106,39% dengan target sebesar 85,5%.



SK 7 : Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah

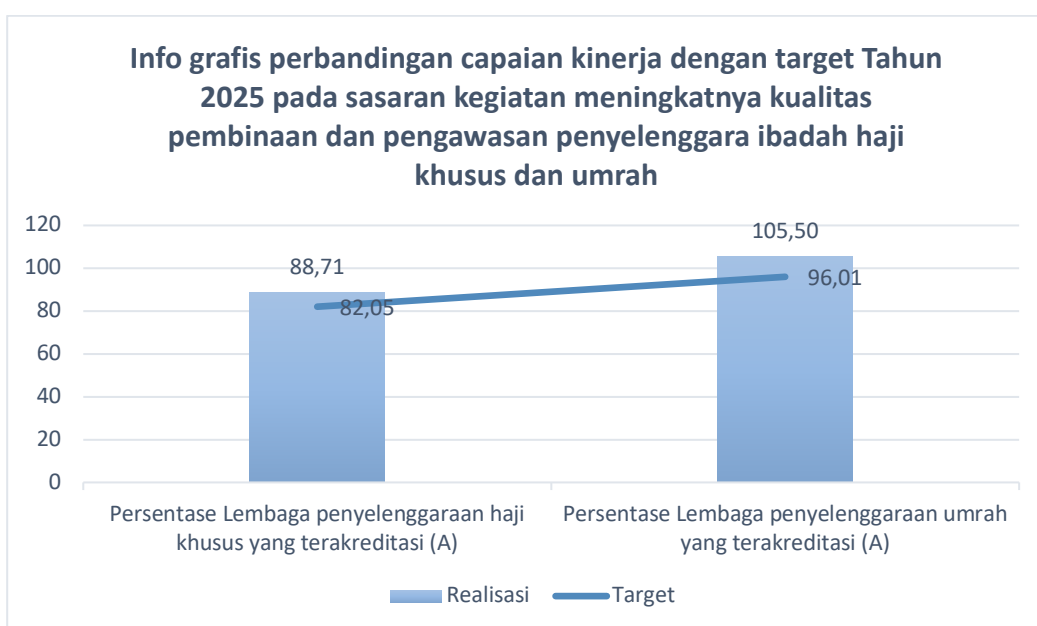
Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah merupakan langkah strategis dalam memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk melaksanakan Ibadah Haji Khusus dan Umrah, diperlukan sistem pembinaan yang komprehesif serta pengawasan yang intensif guna menjamin hak dan perlindungan jemaah.

Tujuan sasaran kegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umrah yang memiliki integritas, kompetensi dan komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, mulai dari proses pendaftaran, manasik, pemberangkatan hingga kepulangan. Pembinaan dilakukan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kebijakan, serta pendampingan teknis agar setiap penyelenggara mampu memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dilaksanakan secara berkelanjutan melalui monitoring dan evaluasi. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, meningkatkan akuntabilitas dan memastikan setiap penyelenggara menjalankan sesuai SOP. Dengan meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan, diharapkan tercipta tata kelola penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah yang lebih tertib, profesional, dan berorientasi pada kepuasan jemaah. Sasaran kegiatan ini mendukung terwujudnya

pelayanan ibadah yang aman, nyaman dan memberikan ketenangan bagi seluruh jemaah dalam menjalankan rangkaian ibadah.

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan satu indikator kinerja yang harus dipenuhi, yakni persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A). Pada indikator kinerja persentase Lembaga penyelenggara haji khusus yang terakreditasi (A), persentase capaian kinerja sebesar 108,12% dengan target sebesar 82,05%. Untuk indikator kinerja persentase Lembaga penyelenggara umrah yang terakreditasi (A), persentase capaian kinerja sebesar 109,88% dengan target sebesar 96,01%.

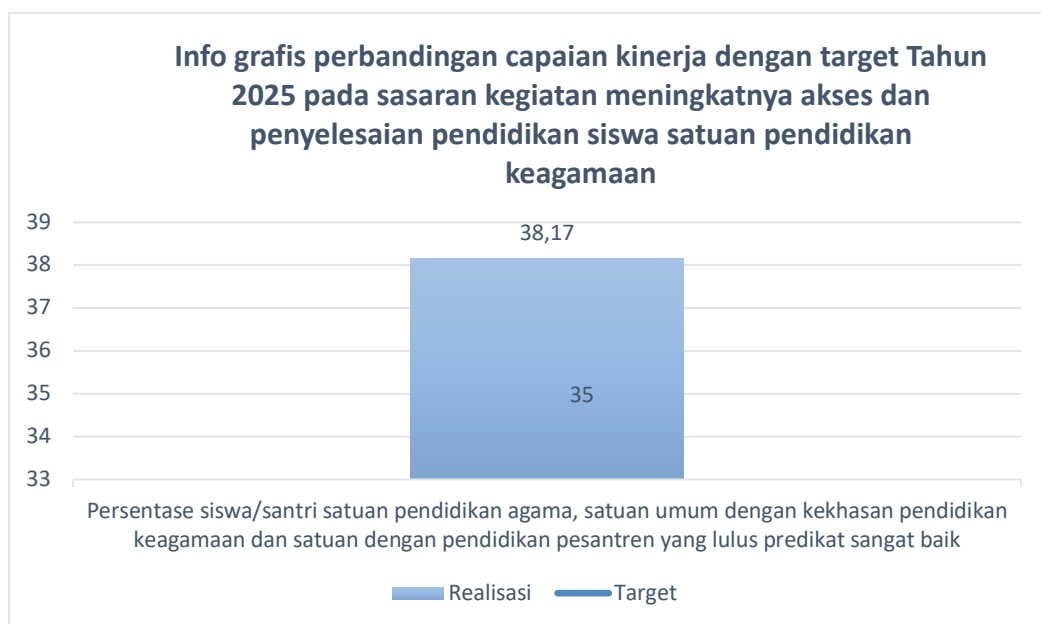


SK 8 : Meningkatnya Akses dan Penyelesaian Pendidikan Siswa Satuan Pendidikan Keagamaan

Peningkatan akses dan penyelesaian pendidikan siswa pada satuan pendidikan keagamaan merupakan upaya strategis dalam menjamin terpenuhinya hak setiap peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk karakter, memperkuat nilai moral dan spiritual, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing. Upaya yang dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan, penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sistem pembelajaran yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan saat ini.

Selain itu, sasaran kegiatan ini juga bertujuan untuk menekan angka putus sekolah melalui sistem pendampingan, pemantauan berkala serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif menjadi faktor pendukung utama agar siswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan dengan hasil yang optimal. Dengan meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan pada satuan pendidikan keagamaan, diharapkan tercipta generasi yang unggul secara akademik serta memiliki pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan yang kuat. Pada akhirnya, sasaran kegiatan ini berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berkarakter, moderat dan berdaya saing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan terdapat satu indikator kinerja, yaitu persentase siswa/santri satuan pendidikan agama, satuan umum dengan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan dengan pendidikan pesantren yang lulus predikat sangat baik. Target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 35% dengan capaian kinerja sebesar 109,07%.



SK 9 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan Keagamaan Yang Berkualitas

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan keagamaan yang mendukung proses pembelajaran yang efektif, efisien dan berkesinambungan. Sarana dan prasarana pendidikan keagamaan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena mempengaruhi kualitas layanan pembelajaran, kenyamanan peserta didik serta kemampuan lembaga dalam

mengembangkan kompetensi dan karakter siswa secara optimal. Melalui sasaran kegiatan ini diharapkan setiap satuan pendidikan keagamaan mampu memiliki fasilitas yang memenuhi standar minimal yang ditetapkan, termasuk ruangan kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, sarana ibadah, teknologi pembelajaran serta ruang penunjang lainnya yang dapat menunjang proses pendidikan secara menyeluruh.

Prasarana pendidikan yang baik mencakup pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas secara terencana dan berkelanjutan untuk mendorong meningkatnya kinerja pendidikan di satuan pendidikan keagamaan tersebut. Upaya ini melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat dan koordinasi antara pemangku kepentingan, baik lembaga pendidikan, komite serta masyarakat, sehingga sarana dan prasarana yang tersedia tidak hanya lengkap namun juga berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern. Dengan adanya fasilitas yang memadai dan berkualitas, proses pembelajaran pada satuan pendidikan keagamaan akan lebih kondusif, inovatif serta mampu meningkatkan prestasi belajar dan kompetensi siswa dalam menghadapi tantangan masa depan.

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif;
2. Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana;
3. Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren;
4. Persentase anak kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha);
5. Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah; dan
6. Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren.

Untuk indikator kinerja persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 9%.



Untuk indikator kinerja persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana, persentase capaian kinerja sebesar 109,85% dengan target 5%. Untuk indikator kinerja persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 7,2%. Untuk indikator kinerja persentase anak kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha), persentase capaian kinerja sebesar 110% dengan target 93%. Untuk indikator kinerja persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 55%. Untuk indikator kinerja jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target sejumlah 2319 anak.

SK 10 : Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Berkualitas, Inklusif, dan Berorientasi Pada Pencapaian Kompetensi Peserta Didik Melalui Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan Yang Objektif dan Akuntabel Serta Pengembangan Perangkat Kurikulum Yang Adaptif dan Relevan

Sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat layanan pendidikan yang tidak hanya berkualitas secara akademik, namun juga bersifat inklusif dan berfokus pada pencapaian kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan yang berkualitas menuntut adanya sistem penilaian yang objektif dan akuntabel, sehingga setiap capaian belajar peserta didik dapat diukur secara transparan dan akurat, serta mencerminkan kemampuan dalam berbagai aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penguatan sistem penilaian membantu pendidik dalam menilai perkembangan

peserta didik secara menyeluruh dan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

Pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan menjadi penentu utama untuk menjamin bahwa kurikulum mampu merespons dinamika kebutuhan peserta didik. Kurikulum adaptif memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, termasuk keberagaman budaya. Dengan penguatan sistem penilaian yang akuntabel dan kurikulum yang adaptif, diharapkan layanan pendidikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan setiap peserta didik, mampu mendorong pencapaian kompetensi secara optimal, serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang berkualitas dan berorientasi pada pengembangan potensi individu. Sasaran kegiatan ini merupakan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing.

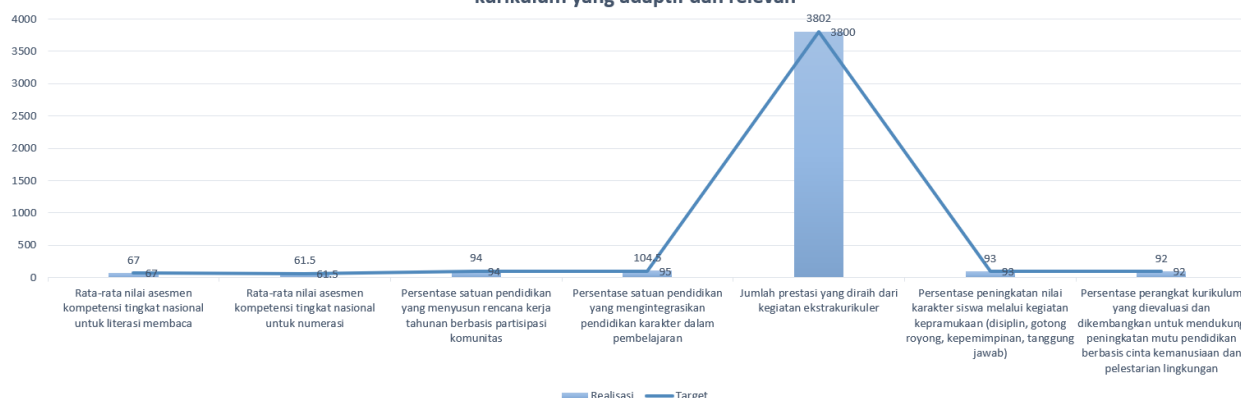
Pada sasaran kegiatan meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja yang harus tercapai, yakni:

1. Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:
 - a. literasi membaca memiliki target indikator kinerja senilai 67 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. numerasi memiliki target indikator kinerja senilai 61,5 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas, target indikator kinerja sebesar 94% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran, target indikator kinerja sebesar 95% dengan capaian kinerja sebesar 110%.
4. Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler, target indikator kinerja sejumlah 3800 dengan capaian kinerja sebesar 100,05%.
5. Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab), target indikator kinerja sebesar 93% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
6. Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan

pelestarian lingkungan, target indikator kinerja sebesar 92% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

7. Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B, target indikator kinerja sebesar 65,4% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
8. Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara, target indikator kinerja sebesar 3,7% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
9. Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual, target indikator kinerja sebesar 0,25% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
10. Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional, target indikator kinerja sebesar 0,47% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
11. Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik, target indikator kinerja sebesar 95,5% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
12. Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran, target indikator kinerja sebesar 74% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
13. Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan, target indikator kinerja sebesar 30% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Info grafis perbandingan capaian kinerja dengan target Tahun 2025 pada sasaran kegiatan meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan



Info grafis perbandingan capaian kinerja dengan target Tahun 2025 pada sasaran kegiatan meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan



SK 11 : Meningkatkan Pemerataan Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan

Sasaran kegiatan meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan merupakan upaya strategis dalam menjamin setiap peserta didik mendapatkan layanan pembelajaran yang merata dan berkualitas. Pemerataan tenaga pendidik tidak hanya terkait dengan jumlah namun juga distribusi guru dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, sehingga tidak terjadi kesenjangan layanan. Kebijakan redistribusi dan penataan guru dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kebutuhan guru terpenuhi secara proporsional di seluruh satuan pendidikan agar proses pembelajaran tetap optimal.

Dengan sasaran kegiatan ini, diharapkan keseimbangan rasio guru terhadap peserta didik dapat tercapai, sehingga setiap sekolah memiliki tenaga pendidik yang memadai sesuai standar pembelajaran yang berlaku. Pemerataan guru mendukung layanan pendidikan inklusif dan pemerataan kesempatan belajar bagi semua peserta didik. Melalui pendekatan berbasis data serta penguatan sistem penempatan, dirancang untuk menghantarkan setiap satuan pendidikan menuju kondisi ideal dimana kualitas pembelajaran tidak lagi dipengaruhi oleh disparitas jumlah tenaga pendidik antar wilayah. Dengan tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang lebih setara berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, sekaligus memperkuat fondasi pendidikan nasional yang berdaya saing.



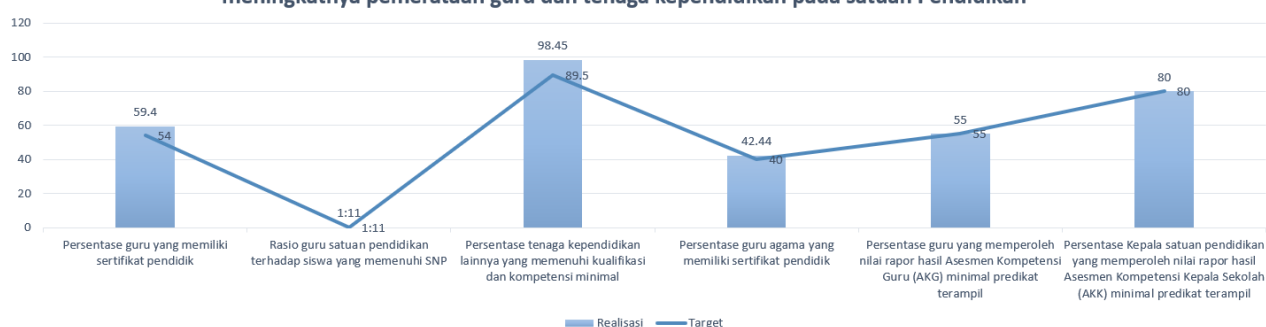
Sebanyak 11.293 guru Pendidikan Agama Islam dari Jawa Timur mengikuti pembukaan Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Batch 3 Kementerian Agama Tahun 2025, Rabu (3/9/2025)

Pada sasaran kegiatan meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan terdapat 12 (dua belas) indikator kinerja yang harus tercapai, yakni:

1. Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik, target indikator kinerja sebesar 54% dengan capaian kinerja sebesar 110%.
2. Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP, target indikator kinerja adalah 01:11 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
3. Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal, target indikator kinerja sebesar 89,5% dengan capaian kinerja sebesar 109,99%.
4. Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik, target indikator kinerja sebesar 40% dengan capaian kinerja sebesar 106,09%.
5. Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil, target indikator kinerja sebesar 55% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
6. Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil, target indikator kinerja sebesar 80% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
7. Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik, target indikator kinerja sebesar 75% dengan capaian kinerja sebesar 110%.
8. Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil, target indikator kinerja sebesar 80% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

9. Persentase guru yang meningkat jenjang karir, target indikator kinerja sebesar 0,45% dengan capaian kinerja sebesar 110%.
10. Persentase pengawas yang meningkat jenjang karir, target indikator kinerja sebesar 0,7% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
11. Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), target indikator kinerja sebesar 59% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
12. Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan, target indikator kinerja sebesar 50% dengan capaian kinerja sebesar 109,81%.

Info grafis perbandingan capaian kinerja dengan target Tahun 2025 pada sasaran kegiatan meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan



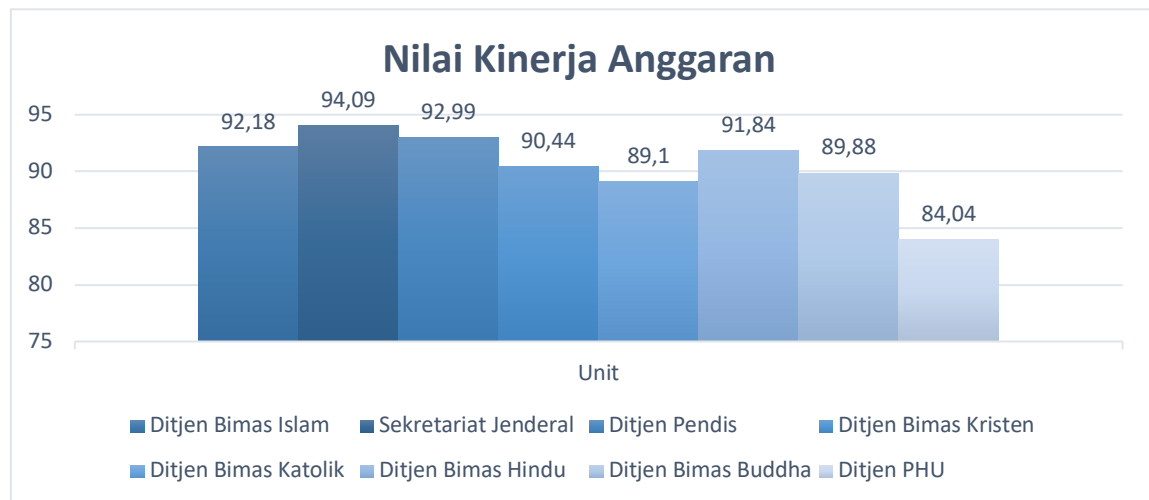
Info grafis perbandingan capaian kinerja dengan target Tahun 2025 pada sasaran kegiatan meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan



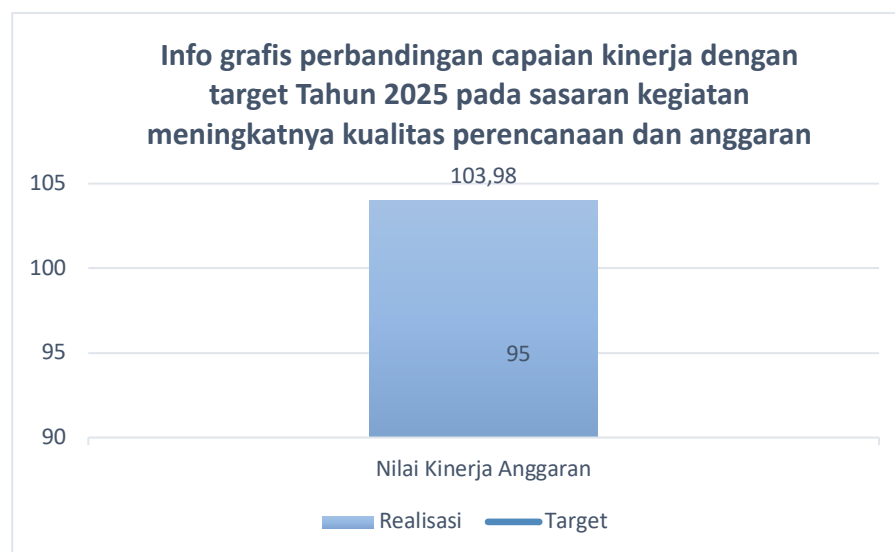
SK 12 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Anggaran

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan. Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap alokasi anggaran terencana dengan matang, tepat sasaran serta sesuai dengan prioritas kebutuhan. Melalui perencanaan yang baik, dokumen anggaran akan mencerminkan gambaran kebutuhan riil secara akurat sehingga

kegiatan dan program dapat dilaksanakan secara optimal tanpa revisi yang berulang dan mengurangi pemborosan anggaran.



Peningkatan kualitas perencanaan mencakup penyusunan rencana kerja dan anggaran yang komprehensif dan berbasis data. Peningkatan kualitas anggaran tidak hanya dilihat dari jumlah yang dialokasikan, namun lebih pada kemampuan anggaran untuk mendukung pencapaian tujuan melalui pemanfaatan sumber daya yang efisien, transparan dan akuntabel. Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran terdapat satu indikator kinerja, yaitu nilai kinerja anggaran. Persentase capaian kinerja sebesar 109,45% dengan target nilai 95. Dengan terwujudnya perencanaan dan anggaran yang berkualitas, maka diharapkan akan mampu menjalankan program secara efektif, memperbaiki capaian kinerja serta mendukung peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi tidak hanya dimaknai sebagai perubahan administratif, tetapi sebagai transformasi terhadap sistem, budaya kerja dan organisasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang prima dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Peningkatan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi diarahkan pada penguatan enam area perubahan, yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui perbaikan yang terstruktur dan berkelanjutan pada area-area tersebut, diharapkan tercipta birokrasi yang adaptif, efektif dan efisien.

Upaya ini berfokus pada peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan. Dengan demikian, Reformasi Birokrasi mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi diharapkan berdampak langsung pada meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, terciptanya pelayanan yang cepat, tepat, berkualitas serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing tinggi. Reformasi Birokrasi bukan sekedar program, melainkan komitmen berkelanjutan untuk menghadirkan pemerintahan yang melayani dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

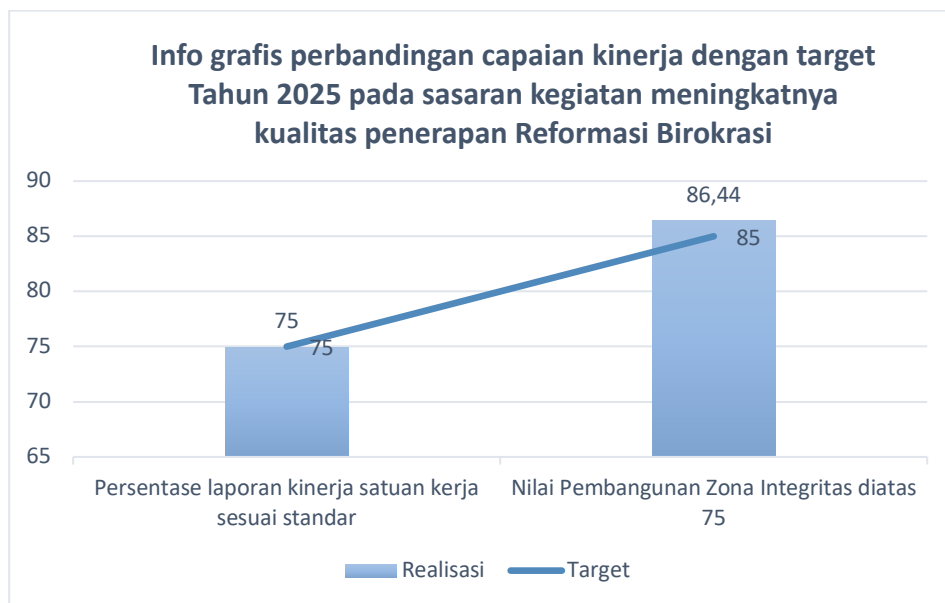


Penandatanganan komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas satuan kerja Kantor Wilayah (Wilayah II) dalam kegiatan Coaching Penilaian Mandiri dan Penilaian Pendahuluan Zona Integritas Tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi yang dilaksanakan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI (25/09/2025)

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar; dan
2. Nilai pembangunan zona integritas diatas 75.

Pada indikator kinerja persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target sebesar 75%. Untuk indikator kinerja nilai pembangunan zona integritas diatas 75, persentase capaian kinerja sebesar 101,69% dengan target nilai 85.



SK 14 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan BMN

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) merupakan komitmen strategis dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya negara yang transparan, akuntabel dan profesional. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam memastikan setiap anggaran dan aset negara dikelola secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peningkatan kualitas tata kelola keuangan difokuskan pada penguatan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta penyusunan laporan keuangan yang andal dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern dan manajemen risiko terus diperkuat guna meminimalkan potensi penyimpangan.

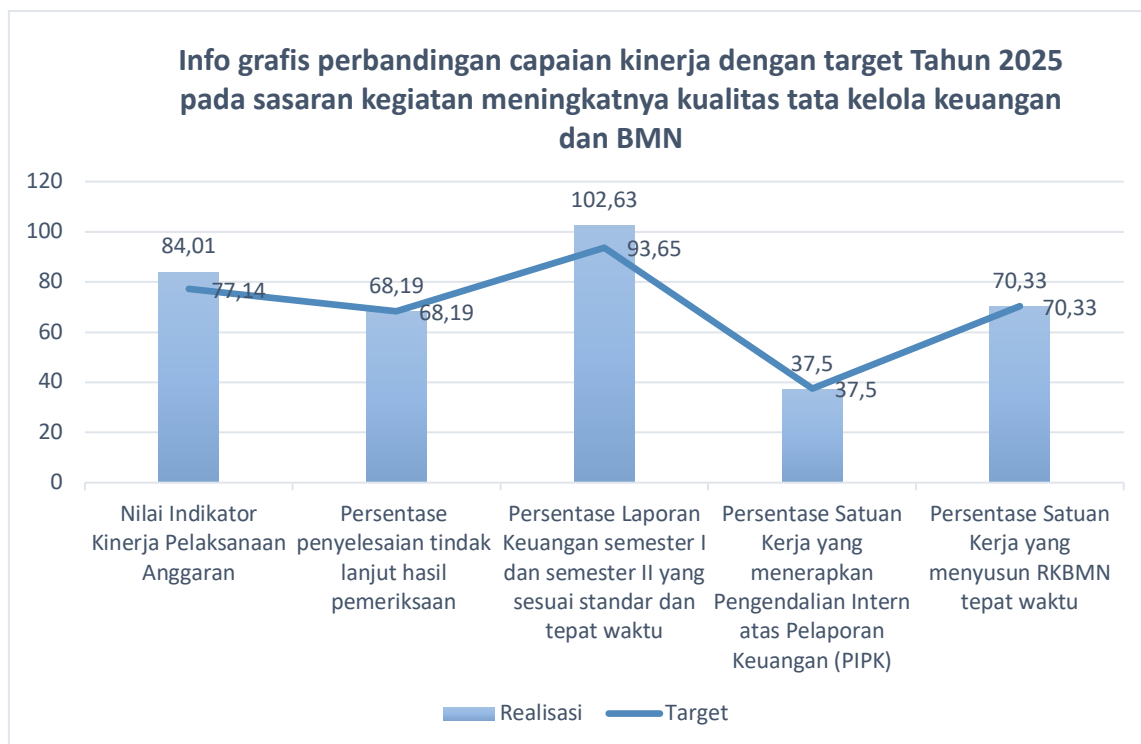
Pengelolaan BMN diarahkan pada tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum. Upaya ini mencakup penatausahaan yang akurat dan mutakhir, optimalisasi pemanfaatan

aset, pengamanan aset negara serta penyelesaian permasalahan aset secara sistematis. Dengan pengelolaan BMN yang profesional, diharapkan seluruh aset negara dapat mendukung kinerja organisasi secara maksimal dan memberikan nilai tambah yang berkelanjutan. Melalui sinergi antara pengelolaan keuangan dan BMN yang berkualitas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja, mempertahankan laporan keuangan yang baik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Tata kelola keuangan dan BMN yang semakin baik akan menjadi pilar penting dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi pada hasil.

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 5 (lima) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
3. Persentase laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu;
4. Persentase satuan kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
5. Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu.

Untuk indikator kinerja nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, persentase capaian kinerja sebesar 108,91% dengan target nilai 77,14. Untuk indikator kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 68,19%. Untuk indikator kinerja persentase laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, persentase capaian kinerja sebesar 109,58% dengan target 93,65%. Untuk indikator kinerja persentase satuan kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 37,5%. Untuk indikator kinerja persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 70,33%.



SK 15 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan ASN (Pengadaan, Penempatan, Pembinaan dan Pengembangan Pegawai)

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten dan berintegritas. Pengelolaan ASN yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan publik. Peningkatan kualitas pengelolaan ASN dimulai dari proses pengadaan pegawai yang dilaksanakan secara transparan, objektif dan berbasis kebutuhan organisasi. Rekrutmen yang tepat memastikan diperolehnya sumber daya manusia terbaik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

Penempatan pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja serta potensi pengembangan. Penempatan yang tepat tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan kolaboratif. Dalam aspek pembinaan dan pengembangan pegawai, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas ASN melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, serta penerapan sistem manajemen kinerja yang objektif dan terukur. Pembinaan yang berkelanjutan diarahkan pada penguatan integritas, disiplin serta budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan. Melalui pengelolaan ASN

yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, diharapkan terwujud aparatur yang adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam bekerja, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kualitas pengelolaan ASN yang semakin baik akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan birokrasi yang profesional, berdaya saing dan dipercaya oleh masyarakat.



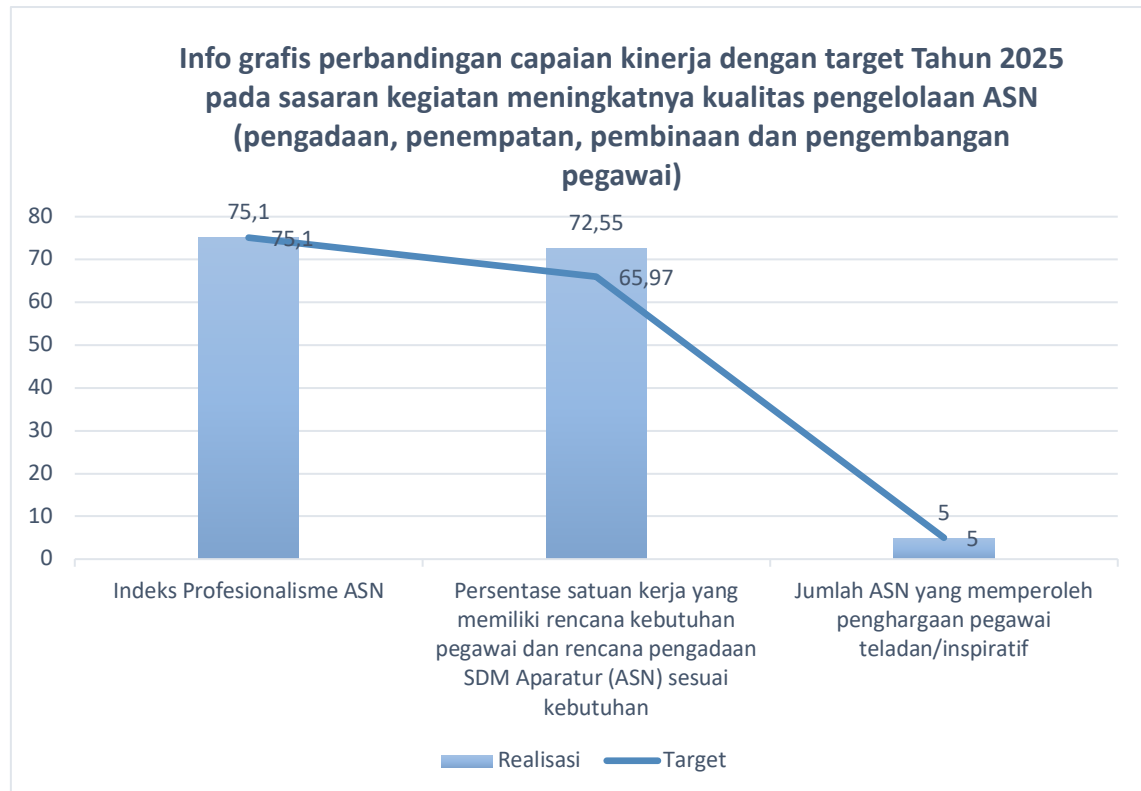
Pemberian penghargaan dan apresiasi kepada pegawai disiplin/teladan/inspiratif oleh Kepala serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur (29/12/2025)

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Indeks Profesionalisme ASN;
2. Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan; dan
3. Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/inspiratif.

Untuk indikator kinerja indeks profesionalisme ASN, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target nilai 75,1. Untuk indikator kinerja persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan, persentase capaian kinerja sebesar 109,98% dengan target 65,97%. Untuk indikator kinerja jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai

teladan/inspiratif, persentase capaian kinerja sebesar 110% dengan target sebanyak 5 pegawai.



SK 16 : Meningkatnya Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum merupakan komitmen nyata dalam mewujudkan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan kurang mampu. Peningkatan kualitas tidak hanya berfokus pada aspek kuantitas layanan, namun juga pada profesionalisme, akuntabilitas, transparansi serta kemudahan akses terhadap layanan hukum. Melalui optimalisasi sistem pelayanan serta pemanfaatan teknologi informasi, layanan dan bantuan hukum diharapkan menjadi lebih responsif, cepat dan tepat sasaran. Selain itu, peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dan organisasi bantuan hukum menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap permasalahan hukum masyarakat dapat ditangani secara komprehensif dan berkeadilan.

Sasaran kegiatan ini juga bertujuan untuk peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi hukum yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat diharapkan lebih sadar akan hak dan kewajiban, serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum. Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum akan memperkuat

kepercayaan publik terhadap sistem hukum, mendukung penegakan hukum yang berintegritas, serta berkontribusi pada terwujudnya kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

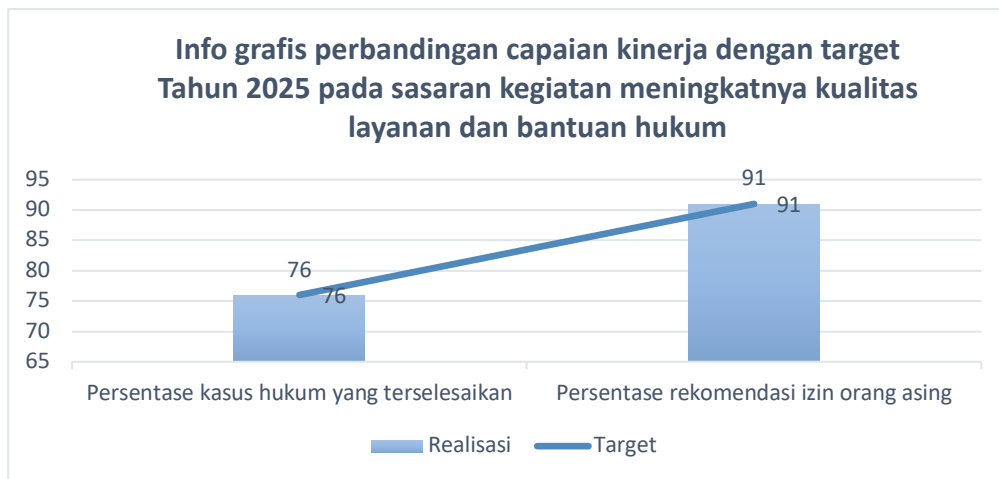


Pembinaan Penguatan Integritas ASN dan Penyuluhan Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Hasan Asy'ari, Rabu (28/10/2025). Materi yang dibawakan mengenai pentingnya mitigasi dan kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi potensi kasus hukum di lingkungan kerja.

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Persentase kasus hukum yang terselesaikan; dan
2. Persentase rekomendasi izin orang asing.

Indikator kinerja persentase kasus hukum yang terselesaikan, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 76% dan untuk indikator kinerja persentase rekomendasi izin orang asing, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 91%.



SK 17 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Tata Persuratan, Arsip dan Layanan Pengadaan Barang Jasa

Sasaran kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Pengelolaan administrasi yang tertib dan sistematis menjadi fondasi utama dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peningkatan kualitas tata persuratan diarahkan pada penerapan sistem administrasi yang terstandar, tertib dan terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap surat masuk dan keluar dapat ditelusuri secara cepat, tepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem persuratan elektronik menjadi bagian penting dalam mempercepat alur disposisi, meminimalkan risiko kehilangan dokumen, serta meningkatkan transparansi proses administrasi.

Dalam aspek kearsipan, sasaran kegiatan difokuskan pada pengelolaan arsip yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip. Penataan arsip yang baik tidak hanya menjamin keamanan dan keutuhan dokumen, tetapi juga memudahkan proses pencarian arsip. Peningkatan kualitas layanan pengadaan barang/jasa diarahkan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Optimalisasi perencanaan pengadaan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem pengadaan berbasis elektronik menjadi faktor utama dalam memastikan proses pengadaan berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Melalui pencapaian sasaran kegiatan ini, diharapkan tercipta tata kelola administrasi dan pengadaan yang profesional, tertib serta berintegritas, sehingga mampu mendukung kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

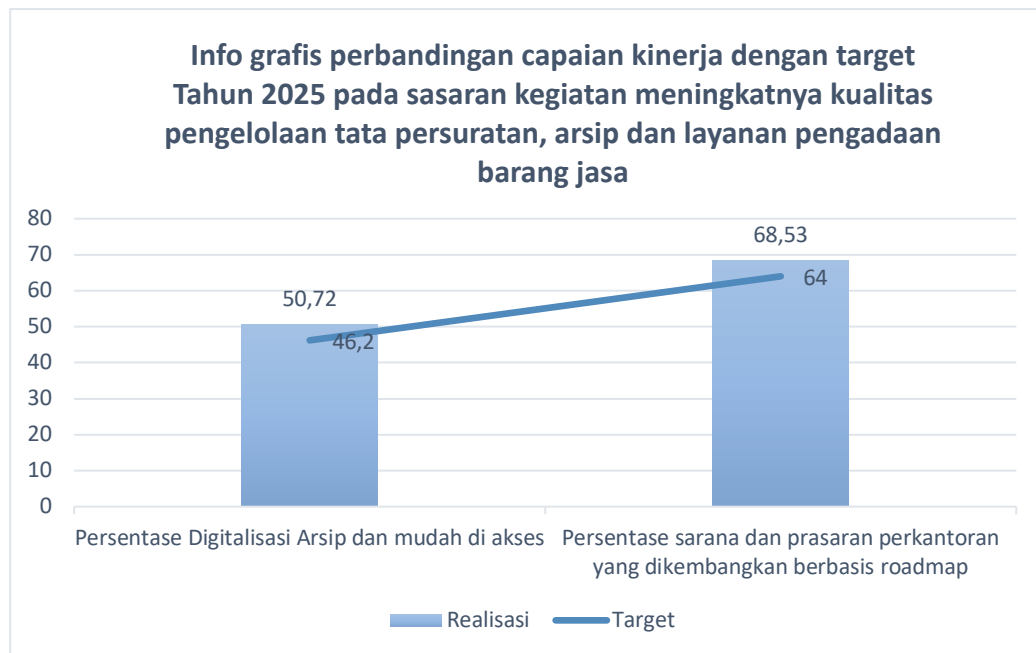


Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip melalui Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE) dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Kearsipan Pemprov. Jawa Timur (2/7/2025)

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses; dan
2. Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap.

Indikator kinerja persentase digitalisasi arsip dan mudah di akses, persentase capaian kinerja sebesar 109,77% dengan target 46,2% dan untuk indikator kinerja persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap, persentase capaian kinerja sebesar 107,08% dengan target 64%.



SK 18 : Meningkatnya Layanan Informasi dan Dokumentasi

Sasaran kegiatan meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi merupakan upaya strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Layanan informasi yang berkualitas menjadi salah satu pilar penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat. Peningkatan layanan informasi dan dokumentasi diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang cepat, tepat dan mudah diakses. Hal ini dilakukan melalui penataan mekanisme pelayanan, penyempurnaan SOP serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi. Dengan sistem yang terintegrasi, proses permohonan, pengolahan, hingga penyampaian informasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pengelolaan dokumentasi yang tertib dan sistematis menjadi bagian penting dalam menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Dokumentasi yang baik tidak hanya mendukung pelayanan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sumber data strategis dalam proses perencanaan, evaluasi dan pengambilan kebijakan. Sasaran kegiatan ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang responsif, komunikatif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, layanan informasi dan dokumentasi diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat citra institusi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

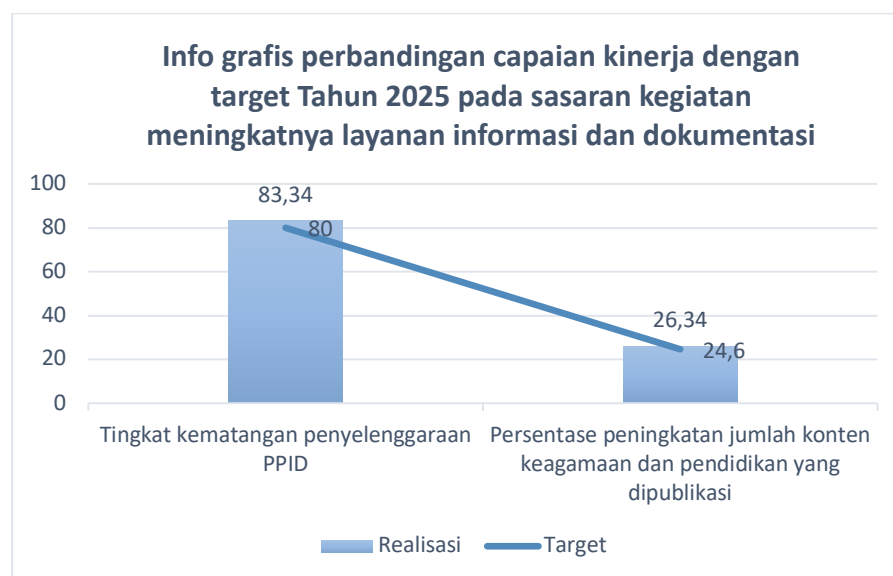


Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, menerima dua penghargaan bergengsi dalam malam puncak penganugerahan Humas Kemenag Award 2025 di Jakarta, Senin (1/12)

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID; dan
2. Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi.

Indikator kinerja tingkat kematangan penyelenggaraan PPID, persentase capaian kinerja sebesar 104,17% dengan target nilai 80 dan untuk indikator kinerja persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi, persentase capaian kinerja sebesar 107,08% dengan target 24,6%.



SK 19 : Meningkatnya Kualitas Data dan Sistem Informasi

Sasaran kegiatan meningkatnya kualitas data dan sistem informasi merupakan langkah strategis dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang berbasis pada data. Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi program dan kebijakan. Peningkatan kualitas data diarahkan pada penguatan tata kelola data melalui standarisasi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemutakhiran data secara berkala. Validitas, konsistensi dan keamanan data menjadi prioritas agar informasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu pengembangan mekanisme verifikasi dan integrasi antar unit kerja menjadi upaya penting untuk meminimalkan duplikasi serta meningkatkan keselarasan data.

Dalam aspek sistem informasi, sasaran kegiatan difokuskan pada pengembangan dan optimalisasi aplikasi yang terintegrasi, andal dan ramah pengguna. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi proses kerja, mempercepat alur layanan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi. Penguatan infrastruktur teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memastikan sistem berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Melalui pencapaian sasaran kegiatan ini, diharapkan terwujud pengelolaan data dan sistem informasi yang modern, aman dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

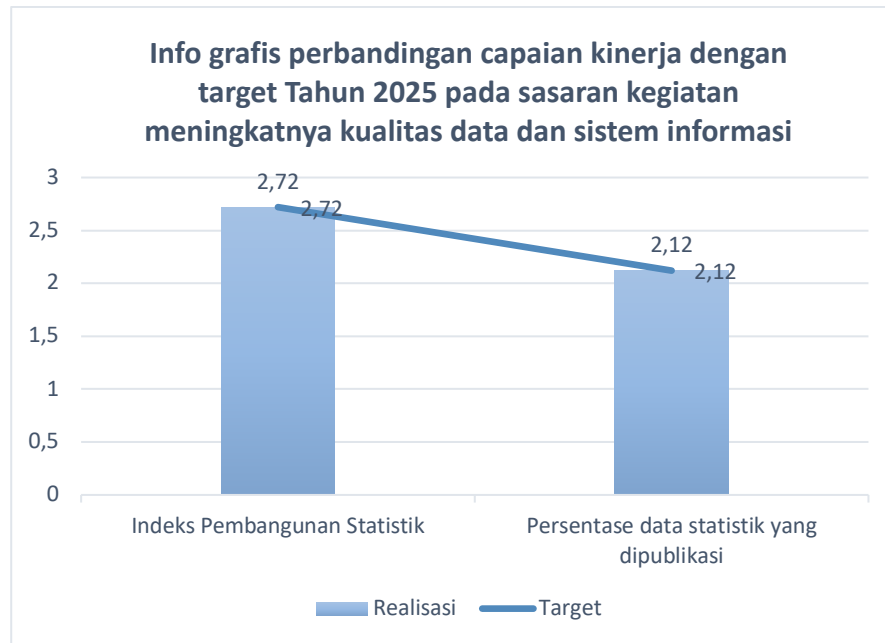


Rapat koordinasi penyusunan Kemenag Jatim dalam Angka Tahun 2025

Untuk mengukur tercapainya sasaran kegiatan meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan 2 (dua) indikator kinerja yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Statistik; dan
2. Persentase data statistik yang dipublikasi.

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target nilai 2,72 dan untuk indikator kinerja persentase data statistik yang dipublikasi, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target 2,12%.



SK 20 : Meningkatkan Layanan Prima Bidang Pendidikan

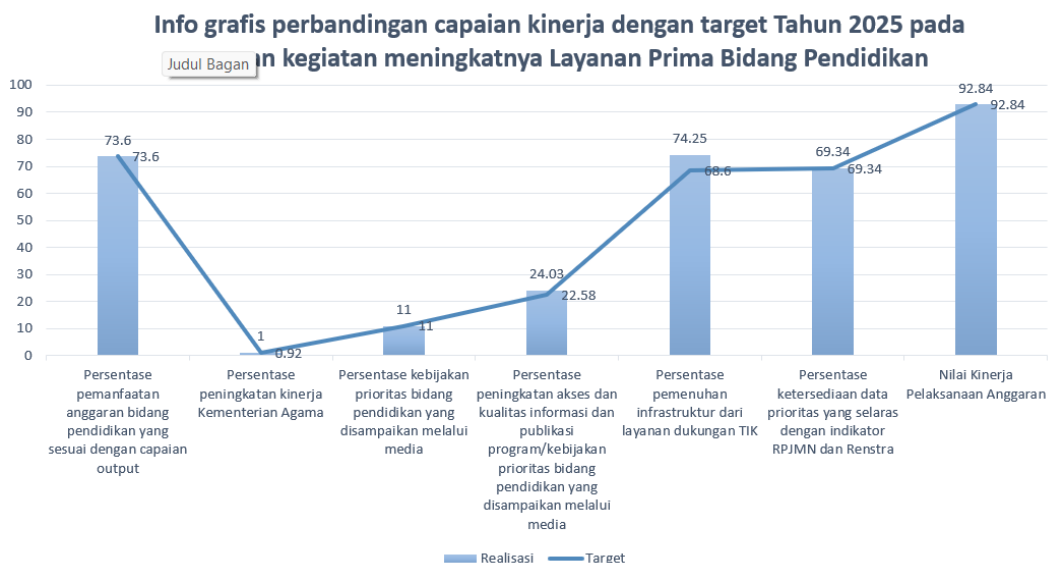
Sasaran kegiatan meningkatnya layanan prima bidang pendidikan merupakan komitmen untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Layanan prima tidak hanya dimaknai sebagai kecepatan dan ketepatan pelayanan, tetapi juga mencakup aspek profesionalisme, transparansi, akuntabilitas serta kemudahan akses bagi seluruh peserta didik. Peningkatan layanan diarahkan pada penguatan standar pelayanan, penyederhanaan prosedur administrasi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses layanan. Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis digital, layanan pendidikan diharapkan menjadi lebih responsif, mudah diakses dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat waktu.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pendidikan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan layanan prima. Penguatan kompetensi tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan, peningkatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan, serta penerapan prinsip ramah, cepat dan solutif menjadi bagian penting dalam menciptakan pengalaman layanan yang berkualitas. Sasaran kegiatan ini juga mencakup penguatan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Dengan demikian, meningkatnya layanan prima di bidang pendidikan diharapkan dapat mendorong peningkatan mutu pembelajaran, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi pada terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Pada sasaran kegiatan meningkatnya layanan prima bidang pendidikan terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus tercapai, yakni:

1. Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 73,6% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 0,92% dengan capaian kinerja sebesar 109,18%.
3. Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 11% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 22,58% dengan capaian kinerja sebesar 106,44%.
5. Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 68,6% dengan capaian kinerja sebesar 108,24%.
6. Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra, target indikator kinerja pada Tahun 2025 sebesar 69,34% dengan capaian kinerja sebesar 100%.
7. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, persentase capaian kinerja sebesar 100% dengan target nilai 92,84.



C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Terdapat kebijakan pemblokiran anggaran yang sangat signifikan, namun pengurangan anggaran tersebut tidak mengurangi kinerja dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran. Pada Tahun 2025, anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 2.530.618.688.000,- dengan realisasi sebesar Rp 2.518.342.178.561,-. Berikut anggaran dan realisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025:

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
1	Sekretariat Jenderal	Rp 60,294,025,000	Rp 52,427,755,191	Rp 7,866,269,809	86,95 %
2	Pendidikan Islam	Rp 2,388,890,401,000	Rp 2,385,051,596,184	Rp 3,838,804,816	99,84 %
3	Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Rp 39,733,050,000	Rp 39,474,028,058	Rp 259,021,942	99,35 %
4	Bimbingan Masyarakat Islam	Rp 31,532,975,000	Rp 31,372,379,789	Rp 160,595,211	99,49 %
5	Bimbingan Masyarakat Kristen	Rp 3,694,159,000	Rp 3,558,532,980	Rp 135,626,020	96,33 %
6	Bimbingan Masyarakat Katolik	Rp 1,855,155,000	Rp 1,851,118,300	Rp 4,036,700	99,78 %
7	Bimbingan Masyarakat Hindu	Rp 1,140,567,000	Rp 1,140,436,750	Rp 130,250	99,99 %
8	Bimbingan Masyarakat Buddha	Rp 3,478,356,000	Rp 3,466,331,309	Rp 12,024,691	99,65 %
Total		Rp 2,530,618,688,000	Rp 2,518,342,178,561	Rp 12,276,509,439	99,51 %



Kemenag
Berdampak



× × × ×

× × × ×

BAB IV

PENUTUP



× × × ×

× × × ×

 jatim.kemenag.go.id

 [kemenagjawatimur](https://www.instagram.com/kemenagjawatimur)

 [Kemenag Jatim](https://www.facebook.com/KemenagJatim)



× × × ×

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas selama Tahun 2025. Laporan ini adalah periode pertama dalam rentang waktu Renstra Tahun 2025-2029. Kami berharap informasi terkait kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dapat disampaikan secara relevan dan transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi.

Capaian kinerja dan kendala dalam memenuhi target indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan telah tergambar jelas dalam laporan ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 93 target indikator kinerja yang harus dicapai dan capaian kinerja atas seluruh indikator tersebut telah melampaui target dengan kategori

SANGAT BAIK

Rerata capaian kinerja mencapai **104.88%**.

Realisasi anggaran tercatat sebesar **99.51%** atau Rp 2.518.342.178.561,- dari total anggaran Rp 2.530.618.688.000,-.

Kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi pada Tahun 2025 akan menjadi bahan evaluasi yang komprehensif. Mengingat Tahun 2025 adalah tahun pertama dari periode Renstra 2025-2029, berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi selama periode ini akan menjadi dasar untuk evaluasi menyeluruh. Hasil evaluasi tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki indikator dan target kinerja pada periode berikutnya.

Diperlukan usaha yang lebih keras dan cerdas, disertai dengan inovasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, perencanaan di masa depan dapat lebih terarah dan efektif, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur pada khususnya dan Kementerian Agama pada umumnya.



Kemenag
Berdampak



× × × ×

× × × ×

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KANWIL KEMENTERIAN
AGAMA PROV. JAWA TIMUR TAHUN 2025



× × × ×

× × × ×



jatim.kemenag.go.id



[kemenagjawatimur](https://www.instagram.com/kemenagjawatimur)



[Kemenag Jatim](https://www.facebook.com/KemenagJatim)



× × × ×



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Sruji Bahtiar

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Kamaruddin Amin

Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 Desember 2025
Pihak Pertama,

Akhmad Sruji Bahtiar

Pihak Kedua,

Kamaruddin Amin

Lampiran Perjanjian Kinerja :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
BIDANG AGAMA					
1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	83
		3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	44,45
		4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	1
		5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	1
		6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	35,5
2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	91
		2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	01:05
		3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	44,5
		4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	4,1
		5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	17,5
		6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	18,2
		7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	45,5
		8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	32,5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	16,5
		10	Persentase calon pengantin yang mendapatkan Bimbingan Perkawinan	Persen	91
		12	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana	Persen	25,35
		13	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah	Persen	- 5.47
		14	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi	Persen	4,91
		15	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	0,1
		16	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	9,2
		17	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dan pengembangan wakaf dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	11.00
		18	Persentase advokasi pengamanan Harta Benda Wakaf (mutasi, sengketa) yang ditindaklanjuti	Persen	11.00
		19	Persentase harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan produktif	Persen	6.00
		20	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional	Persen	25.00
		21	Persentase Lembaga Wakaf yang diawasi sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Persen	2.00
		22	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	15.00
		23	Persentase layanan izin pembentukan lembaga amil zakat dan wakaf	Persen	6.00
		24	Persentase Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan	Persen	10.00
3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.	1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.	1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	80
		2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Nilai	86
5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.	1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	87,5
6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji.	1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	80
2		Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	85,5	
7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);		
			a. Lembaga penyelenggara haji khusus;	Persen	82,05
			b. Lembaga penyelenggara umrah	Persen	96,01
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH					
8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan agama, satuan umum dengan kekhasan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus predikat sangat baik	Persen	35
9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	9
		2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	5

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	7,2
		4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	93
		5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	55
		6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	2319
10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.	1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:		
			a literasi membaca		67
			b numerasi		61,5
		2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	94
		3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	95

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	3800
		5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	93
		6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	92
		7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	65,40
		8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	3,7
		9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen	0,25
		10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,47
		11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen	95,50
		12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	74
		13	Persentase satuan pendidikan umum yang menerapkan kurikulum agama bermuatan moderasi beragama dan pelestarian lingkungan	Persen	30
11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan.	1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	54
		2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	01:11
		3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	89,5
		4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	40

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	55
		6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen	80,00
		7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	75
		8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen	80
		9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen	0,45
		10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen	0,7
		11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen	59
		12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	50
BIDANG TATA KELOLA					
12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	95
13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Persen	75
		2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai	85
14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	77,14
		2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen	68,19
		3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,65

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	37,5
		5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	70,33
15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).	1	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	75,1
		2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen	65,97
		3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan / Inspiratif	Jumlah	5
16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	76
		2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	91
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	46,2
		2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	64
18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Nilai	80
		2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	24,6
19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2,72
		2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,12
20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	73,6
		2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	0,92
		3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	11

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
		4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	22,58
		5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	68,6
		6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen	69,34
		7	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	92,84

Anggaran Se-Provinsi Jawa Timur Th. 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2025
25	KEMENTERIAN AGAMA (Provinsi Jawa Timur)	6.700.138.942.000
025.01	Sekretariat Jenderal	3.871.639.608.000
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.201.150.000
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu	190.000.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	3.011.150.000
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	33.000.000
5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu	33.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.868.405.458.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	307.937.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	940.681.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	540.170.222.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	382.904.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	763.170.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	37.154.248.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	356.487.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	3.288.329.809.000
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	188.122.265.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	149.095.419.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	94.675.119.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	2.934.300.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	48.265.000.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	3.221.000.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	39.026.846.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	39.026.846.000
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	2.576.035.465.000
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	494.374.164.000
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	12.920.000.000
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	481.454.164.000
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.004.715.047.000
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	86.917.078.000
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1.894.217.969.000
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	23.580.000.000
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	76.946.254.000
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	76.946.254.000
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	5.033.130.000
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.656.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.656.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2025
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.276.630.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	1.276.630.000
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.403.000.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	1.403.000.000
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	697.500.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	140.000.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	557.500.000
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik	5.558.543.000
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.326.880.000
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2.326.880.000
025.06. WA	Program Dukungan Manajemen	488.135.000
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	488.135.000
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	6.000.000
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	6.000.000
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.290.423.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	2.290.423.000
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	447.105.000
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	447.105.000
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu	5.017.500.000
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.770.645.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	2.770.645.000
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	706.750.000
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	706.750.000
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	993.305.000
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	993.305.000
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	546.800.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	451.520.000
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	95.280.000
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	5.201.394.000
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.904.100.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	1.904.100.000
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	1.345.700.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	1.345.700.000
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.309.094.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	1.309.094.000
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	642.500.000
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	142.500.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN 2025
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	500.000.000
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	43.531.037.000
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	37.373.366.000
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	129.874.000
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	14.907.671.000
2148	Pembinaan Haji	22.335.821.000
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	6.157.671.000
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	6.157.671.000



Sekretaris Jenderal,

Kamaruddin Amin

Jakarta, 22 Desember 2025
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur,

Akhmad Sruji Bahtiar